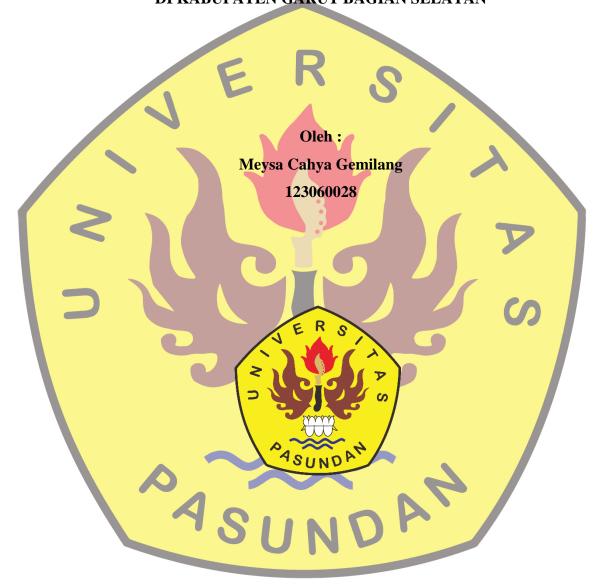
## **TUGAS AKHIR**

# KAJIAN TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GARUT BAGIAN SELATAN



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2019

# KAJIAN TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GARUT BAGIAN SELATAN

## **TUGAS AKHIR**

Dis	110	uń	വ	leh	•
$\boldsymbol{\nu}$	us	uII	V.		•

Meysa Cahya Gemilang

123060028

# Bandung, Mei 2019

Menyetujui:

	Menyetujui:		
2			
1. Dr. Ir. Ari Djatmiko, M	IT. (K	(etua Sidang)	
2. Dr. Ir. Ari Djatmiko, M	IT. (P	embimbing U <mark>tama)</mark>	
3. Ir. Reza Martani Surdia	a, MT. (C	o-Pembimbing)	·co
4. Ir. Supratignyo Aji, MT	Г. (Р	enguji)	
5. Gerry Andrika Risman	a ST, MT. (P	enguji)	
	MANA		
	4	_	
	Mengetahui,		
		4	
Koordinator TA dan Sidang	Sarjana	Ketua Program	Studi
	2.11 M L	Perencanaan Wilaya	ah dan Kota

(Dr. Ir. Firmansyah, MT)

(Ir. Reza Martani Surdia, MT)

# KAJIAN TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GARUT BAGIAN SELATAN

## **TUGAS AKHIR**



(Dr. Ir. Ari Djatmiko, MT)

(Ir. Reza Martani Surdia, MT)

#### **ABSTRACT**

The development of a region or city should be followed by the availability of complete facilities and can serve the needs of the local community and the community from outside the region or city, so it needs to be seen the availability of facilities, especially educational facilities. APK and APM values for high school education have not reached 100% on average. Only in Pameungpeuk sub-district where the APK and APM values have reached 100% or more. This is due to the fact that the population of students who attend school at a level includes children aged beyond the school age limit at the level of education. Based on the APM and APK data for the senior secondary education level the average value is still less than the target of 100%. The average value of APM and APK has decreased at the junior and senior high school level while at the elementary level the average in each sub-district has a fairly good percentage. The analytical methods used are availability, service area, needs and level of service facilities, projections. The results of this study indicate the addition of 6 primary schools, the addition of 9 junior high schools, and the addition of 1 senior high school in 2038.

Keywords: Educational Facilities, Educational Facility Needs



#### **ABSTRAK**

Perkembangan suatu wilayah atau kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan sarana yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar wilayah atau kota, sehingga perlu dilihat ketersediaan sarana khususnya sarana pendidikan. Nilai APK dan APM untuk jenjang pendidikan SMA rata rata belum mencapai 100%. Hanya pada kecamatan pameungpeuk yang dimana nilai APK dan APM nya sudah mencapai 100% bahkan lebih. Hal ini diakibatkan karek<mark>a populasi murid yang bersekolah pada s</mark>uatu jenjang mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan data APM dan APK untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas rata rata nilai masih kurang dari target yaitu 100%. Rata – rata nilai APM dan APK <mark>mengalami penuruna</mark>n pada jenjang SMP dan SMA sedangkan pada jenjang SD rata rata pada setiap kecamatan memiliki persentase yang cukup baik. Adapun metode analisis yang digunakan adalah ketersediaan, wilayah pelayanan, kebutuhan dan tingkat pelayanan sarana, proyeksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya penambahan sekolah dasar sebanyak 6 unit, penambahan <mark>sekolah mene</mark>ngah pertama sebany<mark>a</mark>k 9 <mark>unit, dan penambahan sekolah menen</mark>gah atas sebanyak 1 unit pada tahun 2038.

Kata Kunci : Sarana Pendidikan, Kebutuhan Sarana Pendidikan



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR PUSTAKA	viii
	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi	13
1.5 Batasan Studi	13
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.6.1 Metode Pendekatan	14
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	15
1.6.3 Metode Analisis	15
1.7 Sistematika Pembahasan	20
1.8 Kerangka Berfikir	21
1.9 Matrik Analisis	22
90140	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Pengertian Sarana Berdasarkan Hirarki Pelayanan	24
2.2 Peran Sarana Umum	24
2.3 Pengertian Sarana Berdasarkan Jenis	25
2.3.1 Sarana Pendidikan	25
2.3.2 Sarana Kesehatan	39

2.3.3 Sarana Peribadatan	39
2.3.4 Sarana Perdagangan dan Jasa	40
2.3.5 Sarana Ruang Terbuka	41
2.3.6 Sarana Olahraga	42
2.4 Standar dan Ketentuan Mengenai Daerah Layanan Sarana Pendidik	can43
2.5 Identifikasi Variabel Penelitian	44
2.6 Tingkat Kebutuhan dan Tingkat Pelayanan	
2.7 Teori Lokasi Dalam Penentuan Fasilitas	45
2.7.1 Teori Lokasi	45
2.7.2 Teori Central Place	48
2.8 Analisis Kemampuan Lahan	51
	52
2.8.2 SKL Kemudahan Dikerjakan	
2.8.3 SKL Kestabilan Lereng	54
2.8.4 SKL Kestabilan Pondasi	55
	56
2.8.6 SKL Drainase	58
2.8.7 SKL Terhadap Erosi	<b>6</b> 0
2.8.8 SKL Pembuangan Limbah	
2.8.9 SKL Bencana Alam	
2.8.10 Analisis Kemampuan Lahan	63
2.9 Kesesuaian Lahan Permukiman	64
2.10 Pengertian APM dan APK	65
2.10.1 Pengertian Angka Partisipasi Murni	65
2.10.2 Pengertian Angka Partisipasi Kasar	66
2.11 Studi Terdahulu	68
BAB III GAMBARAN UMUM	79
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kajian	79
3.1.1 Letak Administrasi	79
3.1.2 Kependudukan	86
3.2 Penggunaan Lahan di Wilayah Kajian	92

3.2.1	Permukiman	93
3.2.2	Kesesuaian Lahan Permukiman	103
3.2.3	Akses Jaringan Jalan Wilayah Kajian	106
3.3 Gamba	aran Umum Sarana Pendidikan di Wilayah Kajian	108
3.3.1	Profil Sarana Pendidikan Berbagai Jenjang	116
BAB IV A	ANALISIS	126
4.1 Analis	sis Wilayah Pel <mark>ayanan Sarana Pendidikan</mark>	126
4.1.1	Wilayah Pelayanan Sekolah Dasar	127
4.1.2	Wilayah Pelayanan Sekolah Menengah Pertama	143
	Wilayah Pelayanan Sekolah Menengah Atas	
4.2 Analis	sis Kebutuhan Sarana Pendidikan Eksisting	177
4.2.1	Kebutuhan Sarana Pendidikan Eksisting	177
	Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Eksisting	
4.3 Analis	sis Perbandingan Kondisi Sarana Pendidikan	228
	sis Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan	
4.4.1	Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Dasar	241
4.4.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	<mark></mark> 244
4.4.3	Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama	248
4.4.4	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah	
	Pertama	252
4.4.5	Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas	256
4.4.6	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas	260
	sis APM dan APK Sarana Pendidikan	
4.5.1	Analisis Angka Partisipasi Murni	265
4.5.2	Analisis Angka Partisipasi Kasar	270
4.6 Araha	nn Penentuan Lokasi Sarana Pendidikan	274
BAB V K	ESIMPULAN DAN REKOMENDASI	289
	npulan	
	mendasi	
5.3 Kelen	nahan Studi	294
5.4 Studi	Laniutan	295

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah atau kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan sarana yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar wilayah atau kota, sehingga perlu dilihat ketersediaan sarana khususnya sarana pendidikan. Dalam perkembangannya suatu wilayah atau kota, sarana memang memiliki peran penting yang dapat menunjukan apakah suatu wilayah atau kota tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dilihat dari ketersediaan sarananyanya yang lengkap sehingga dengan demikian secara berkesinambungan pemerintah berusaha meningkatkan kuantitas sarana yang ada, hal ini juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada pada wilayah atau kota tersebut, sehingga ketersediaan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah atau kota. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarajat sesuai dengan peraturan dan perundangan. Implementasi dari kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana wilayah atau kota.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan upaya strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, karena melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi masyarakat untuk mampu bersaing pada era globalisasi ini.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajarmengajar dalam suatu wilayah. Tingkat pendidikan sangat menentukan
perkembangan dan kemajuan bagi wilayah tersebut karena mempengaruhi indeks
pembangunan masyarakat (IPM). Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat pada
suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendidikannya
kuantitas dari sarana pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat kemajuan
bagi wilayah tersebut, oleh karena itu penyediaan sarana pendidikan sangat
penting bagi perkembangan suatu wilayah untuk mendukung perkembangan
penduduknya.

Untuk melihat suatu keberhasilan pembangunan pendidikan digambarkan dalam misi 5K adapun yang dimaksud dengan misi 5K adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan dan untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yaitu kepastian untuk mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Statistik Pendidikan Tahun 2013.)

Berdasarkan data APK dan APM yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan Tahun 2017 dapat dilihat bahwa ditiap kecamatan memiliki nilai APK dan APM dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya berikut data APK dan APM berbagai jenjang pendidikan di tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 APK dan APM Berbagai Jenjang Pendidikan Di Tiap Kecamatan Kabupaten Garut Bagian Selatan Tahun 2017

No. Vacamatan		Vaccometer SD		SMP		SMA	
No	Kecamatan	APM (%)	APK (%)	<b>APM</b> (%)	APK (%)	APM (%)	APK (%)
1	Banjarwangi	81	90	30	38	6	46
2	Bungbulang	101	110	43	53	11	71
3	Caringin	99	109	45	59	11	85
4	Cibalong	102	109	32	39	7	66

Nic	Vaccinator	SD		SMP		SMA	
No	Kecamatan	APM (%)	APK (%)	<b>APM</b> (%)	APK (%)	<b>APM</b> (%)	APK (%)
5	Cihurip	90	98	33	44	17	64
6	Cikajang	105	117	32	39	5	52
7	Cikelet	85	93	27	33	5	44
8	Cisewu	90	99	31	38	4	43
9	Cisompet	102	111	43	53	8	74
10	Mekarmukti	102	112	44	62	15	76
11	Pakenjeng	82	90	38	49	10	70
12	Pameungpeuk	96	104	38	47	8	61
13	Pamulihan	97	105	40	48	10	70
14	Peundeuy	94	106	20	26	5	28
15	Singajaya	97	106	21	26	4	34
16	Talegong	90	99	38	48	9	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas bisa di ketahui bahwa nilai APK dan APM untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA rata rata belum mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan kajian terhadap tingkat pelayanan sarana pendidikan di wilayah kajian dan memberikan alternatif lokasi pembangunan sarana pendidikan berbagai jenjang guna mempermudah masyarakat dalam mengakses sekolah. Penelitian yang dimaksud berjudul "Kajian Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan di Kabupaten Garut Bagian Selatan".

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data APM dan APK untuk jenjang pendidikan sekolah menengah rata rata nilai masih kurang dari target yaitu 100%. Rata – rata nilai APM dan APK mengalami penurunan pada jenjang SMP dan SMA sedangkan pada jenjang SD rata rata pada setiap kecamatan memiliki persentase yang cukup baik. (Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2017).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Kabupaten Garut masuk kedalam wilayah pengembangan kawasan tertentu sebagai salah satu kantong kemiskinan dan sebagai daerah tertinggal di Jawa Barat, khususnya wilayah garut bagian selatan yang dijadikan pusat pengembangan pariwisata dan wilayah konservasi (Pameungpeuk dan Bungbulang). Dengan dijadikannya wilayah garut selatan sebagai pusat pengembangan konservasi hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Garut Selatan, seperti minimnya penyediaan sarana prasarana khususnya sarana pendidikan. Dimana pada pada Kecamatan Cikelet dengan jumlah penduduk 11.348 Jiwa hanya ada 2 taman kanak-kanak (TK), 27 SD, 8 madrasah ibtidaiyah (MI), 2 SLTP, dan 2 MTs. Di Kecamatan Cikelet belum terdapat sarana pendidikan SMA sehingga penduduk Kecamatan Cikelet yang ingin melanjutkan pendidikan SMA harus ke Kecamatan Pameungpeuk dengan menempuh jarak 16,4 km atau kurang lebih 1 jam perjalanan, yang hal tersebut juga berdampak pada Tingkat Partisipasi Murni tingkat SMA di Kabupaten Garut hanya sebesar 60%. (RKPD Kab. Garut Tahun 2017).

Lulusan SMP di Kabupaten Garut bagian selatan sebagian ada yang melanjutkan SMA di wilayah lain, hal ini di sebabkan karena penyebaran sekolah menengah atas belum merata. Sehingga mengakibatkan APM dan APK sekolah menengah atas belum sesuai target. Kondisi ini sangat berperngaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian di daerah dan menyebabkan masyarakat jatuh miskin karena banyaknya pengangguran dan perekonomian rendah. (Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2017).

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Garut bagian selatan menyangkut sarana pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan sekolah yang belum bisa merata, kurang kelas pada setiap jenjang pendidikan sehingga menimbulkan banyak lulusan SMP disetiap kecamatan yang tidak tertampung atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, anak putus sekolah terutama di daerah daerah tertinggal bagian selatan, setelah lulus SMP mereka bekerja sebagai petani membantu orang tua mereka atau dinikahkan, dll serta luas kecamatan yang terlalu luas pada setiap kecamatannya membuat jarak sekolah dengan sekolah lainnya berjauhan. (Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2017).

Sebagai faktor penting, sarana pendidikan diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat terjangkau oleh setiap penduduk sehingga perlu dipertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi fasilitas dengan konsentrasi penduduk. Untuk jumlah sarana pendidikan sekolah dasar di kabupaten garut bagian selatan memiliki 493 unit baik SD/MI, untuk sekolah menengah pertama memiliki 127 SMP/MTS unit dan untuk sekolah menengah atas memiliki 53 unit baik SMA/SMK/MA dari 16 kecamatan yang sudah terbangun atau eksisting di kabupaten garut bagian selatan. (Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2017).

Ketersediaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah, ruang kelas, serta tenaga pengajar merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengembangan kawasan, khususnya apabila dikaitkan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sebagai faktor penting, sarana pendidikan diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat terjangkau oleh setiap penduduk sehingga perlu dipertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi fasilitas dengan konsentrasi penduduk. Pada dasarnya tingkat pelayanan sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Garut masih belum memadai, kecuali sarana pendidikan berupa SD. Oleh karena itu rencana pengembangan sarana pendidikan di Kabupaten Garut diarahkan pada pada peningkatan kuantitas sarana pendidikan yang dibarengi dengan penyediaan tenaga pengajar baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas tenaga pengajar. Sehingga akan tercapai kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang akan membangun Kabupaten Garut menjadi kabupaten yang lebih maju di masa yang akan datang. (RTRW Kabupaten Garut 2011 – 2031).

Besarnya luas wilayah pada setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Garut bagian selatan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk melanjutkan sekolah. Karena jarak dari setiap kecamatan ke kecamatan lainya lumayan jauh sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Berdasarkan rumusan masalah tugas akhir ini yaitu belum meratanya pembangunan sarana pendidikan di wilayah garut bagian selatan. Adapun beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Apakah wilayah pelayanan sarana pendidikan sudah melayani penduduk berdasarkan usia pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan ?
- 2. Apakah jumlah kebutuhan sarana pendidikan dimasa yang akan datang dapat melayani penduduk berdasarkan usia pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan ?
- 3. Apakah tingkat pelayanan sarana pendidikan sudah dapat melayani penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Garut bagian selatan ?
- 4. Apakah nilai APM dan APK sarana pendidikan pada tahun 2038 di Kabupaten Garut sudah dapat mencapai nilai rata rata?
- 5. Dimana arahan penempatan lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan ?

## 1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

## 1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam studi ini adalah mengkaji ketersediaan, kebutuhan dan wilayah pelayanan sarana pendidikan serta mencari lokasi penempatan sarana pendidikan dimasa yang akan datang secara kuantitas untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan sarana pendidikan di kabupaten garut bagian selatan.

#### 1.3.2 Sasaran

Sasaran yang harus di capai dalam mencapai tujuan diatas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Identifikasi wilayah pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan;
- 2. Identifikasi kebutuhan dan tingkat pelayanan eksisting sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan;

- 3. Identifikasi proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan;
- 4. Identifikasi nilai APM dan APK sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan; dan
- 5. Arahan penempatan lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

## 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Garut bagian selatan. Yang mana dalam Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031) deliniasi Kabupaten Garut bagian selatan mencakup 16 Kecamatan dengan 137 Desa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada **tabel 1.2** dibawah ini.

Tabel 1.2 Wilayah Garut Bagian Selatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Banjar Wangi	1042
		<b>B</b> ojong	656
		Dangiang	551
		<b>J</b> ayabakti	631
	500	Kadongdong	934
1	Banjar Wangi	Mulyaja <mark>ya</mark>	2196
		Padahur <mark>ip</mark>	1029
		Talaga <mark>jaya</mark>	453
		Talagasari	690
		Tanjungjaya	1860
		Wangunjaya	2136
(	A O.	Bojong	2128
	, 011	Bungbulang	374
		Cihikeu	1330
		Gunamekar	1140
		Gunung Jampang	480
2	Bungbulang	Hanjuang	340
		Hegarmanah	2996
		Margalaksana	800
		Mekarbakti	2024
		Mekarjaya	1050
		Sinarjaya	2026

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Tegallega	1284
		Wangunjaya	1302
		Caringin	1674
		Cimahi	1498
3	Caringin	Indralayang	1684
	Carman	Purbayani	1314
		Samuderajaya	2181
		Sukarame	3119
		Cigaronggong	1153
		Karyamukti	1437
1		Karyasari	1124
		Maroko	1582
		Mekarmukti	1527
4	Cibalong	Mekarsari	2909
		Mekarwangi	994
		Najaten	1337
		Sagara	3507
		Sancang	5184
		Simpang	881
		Cihurip	903
5	Cihurip	<mark>C</mark> isangkal	686
3	Chlump	J <mark>ay</mark> amukti	1084
		Mekarwang	2794
		Cibodas	365
	M	Cikajang	118
		Cikanda <mark>ng</mark>	2357
	4	Cipang <mark>ramatan</mark>	3645
		Giriawas	567
6	Cikajang	Girijaya	681
		Margamulya	422
	40.	Mekarjaya	806
	311	Mekarsari	177
		Padasuka	155
		Simpang	1396
		Awasagara	953
		Cigadog	3831
		Cijambe	804
7	Cikelet	Cikelet	614
		Ciroyom	1034
		Girimukti	905
		Karangsari	2804

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Kertamukti	2284
		Linggamanik	1684
		Pamalayan	1593
		Tipar	1144
		Cikarang	2260
		Cisewu	1539
		Girimukti	2664
8	Cisewu	Mekarsewu	1011
		Nyalindung	691
		Pamalayan	2178
		Sukajaya	5733
1		Cihaurkuning	1642
		Cikondang	3715
		Cisompet	578
		Depok	999
		Jatisari	1021
9	Cisompet	Margamulya	1978
		Neglasari	2508
		Panyindangan Panyindangan	1508
		Sindangsari	1384
		Sukamukti /	709
		Sukanagara	1335
		Cijayana	978
		Jagabaya	1028
10	Mekarmukti	Karangwangi	1175
		Mekarm <mark>ukti</mark>	588
	4	Mekars <mark>ari</mark>	338
		Depok	729
		Jatiwangi	2622
		Karangsari	2571
	40	Neglasari	694
		Panyindangan	715
11	Deltaniana	Pasirlangu	678
11	Pakenjeng	Sukamulya	903
		Talagawangi	6306
		Tanjung Jaya	1181
		Tanjung Mulya	480
		Tegal Gede	1530
		Wangunjaya	709
12	Damaunanaula	Bojong	980
12	Pameungpeuk	Bojongkidul	618

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Jatimulya	500
		Mancagahar	509
		Mandalakasih	540
		Paas	472
		Pameungpeuk	569
		Sirnabakti	496
		Garumukti	2370
		Linggarjati	2689
13	Pamulihan	Pakenjeng	2206
		Pananjung	989
		Panawa	3250
		Pangrumasan	2345
		Peundeuy	262
14	Peundeuy	Purwaraja	550
14	reundedy	Saribakti	510
		Sukanagara	703
		Toblong	1013
		Cigintung	408
		Ciudian	330
		Girimukti	427
		Karangagung	670
15	Singajaya	Mekartani	658
		Pancasura	655
		Singajaya	588
	M	Sukamulya	887
		Sukawa <mark>ngi</mark>	724
	4	Mekar <mark>Mukti</mark>	887
		Mekarmulya	727
		Mekarwangi	550
16	Talegong	Selaawi	678
	40	Sukalaksana	1869
		Sukamaju	3160
		Sukamulya	2924
	Total	Luas	190749

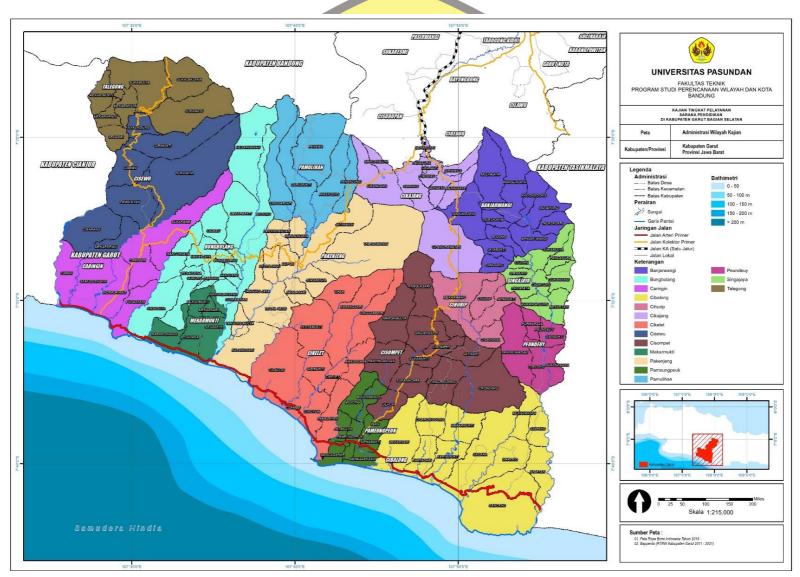
Sumber: Bappeda, Kabupaten Garut Tahun 2017

Wilayah garut bagian selatan secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan cisurupan dan kecamatan cigedug;
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten tasikmalaya;
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan cianjur; dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Garut Bagian Selatan



## 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya sebatas analisis sarana pendidikan berdasarkan ketersediaan sarana pendidikan. Ruang lingkup materi dalam "Kajian Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan" adalah sebagai berikut:

- 1. Teridentifikasinya wilayah pelayanan sarana pendidikan di kabupaten garut bagian selatan berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004 tentang radius pelayanan sarana pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat;
- 2. Teridentifikasinya kebutuhan dan tingkat pelayanan sarana pendidikan eksisting di kabupaten garut bagian selatan meliputi SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat pada kondisi eksisting;
- 3. Teridentifikasinya proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan pada masa yang akan datang berdasarkan proyeksi jumlah penduduk menurut usia pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan sehingga dapat di ketahui perkiraan kebutuhan kelas dan penambahan sarana pendidikan pada tahun 2018-2038 meliputi SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat;
- 4. Teridentifikasinya nilai APM dan APK sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan pada masa yang akan datang berdasarkan proyeksi jumlah siswa menurut usia pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan sehingga dapat di ketahui nilai APM dan APK sarana pendidikan pada tahun 2038 meliputi SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat; dan
- 5. Teridentifikasinya penempatan lokasi sarana pendidikan pada masa yang akan datang di kabupaten garut bagian selatan berdasarkan faktor faktor penempatan lokasi dan menurut Permen No. 24 Tahun 2007 Tentang SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan.

## 1.5 Batasan Studi

Jika dilihat dari permasalahan sarana pendidikan di kabupaten garut khususnya pada bagian selatan maka cukup luas dan cukup banyak lingkupnya jika di teliti secara menyeluruh dalam penelitian ini. Dengan melihat tujuan dari penulis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kebutuhan dan wilayah pelayanan sarana pendidikan di kabupaten garut bagian selatan sehingga

analisis yang di kaji hanya melihat pelayanan dan kebutuhan di masa yang akan datang serta sebaran sarana pendidikan.

Adapun yang menjadi batasan studi dari penulis sebagai berikut :

- Sarana Pendidikan meliputi SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang dimana disebutkan bahwa untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Tidak melihat kepada kebutuhan luas lahan sarana pendidikan;
- Dalam kajian studi ini, kajian kualitatif dalam hal ini yang merupakan penilaian mengenai kualitas sarana pendidikan (sekolah) tidak termasuk dalam analisis yang dilakukan. Dikarenakan kajian ini hanya terfokus pada jumlah dan sebaran setiap sarana pendidikan.

## 1.6 Metodologi Penelitian

#### 1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan yaitu pendekatan tingkat pelayanan fasilitas dasar. Tingkat pelayanan fasilitas dasar adalah untuk memenuhi kebutuhan layanan kecamatan atau desa bagi wilayah atau kota yang memerlukan dilihat dari sisi supply dan mengarahkan perkembangan kota. Pendekatan tingkat pelayanan sarana pendidikan dasar di Kabupaten Garut bagian selatan dilakukan dengan cara:

 Mengukur kapasitas pelayanan berdasarkan persyaratan pelayanan dasar mengacu pada standar yang ada yaitu standar mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh dan SNI 03 – 1733 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007 tentang SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk memperoleh tingkat pelayanan yang optimal dari segi *supply*.

## 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu melakukan referensi yan berhubungan dengan topik studi, diperoleh dari buku-buku serta hasil penelitian-penelitian sebagai landasan teori dan bahan perbandingan, serta data-data yang diperoleh dari Dinas atau Instansi Pemerintahan terkait.

## b. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di bagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- Observasi lapangan, yaitu dengan cara mengamati kondisi eksisting dilapangan mengenai sarana pendidikan di kabupaten garut bagian selatan;
- Dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan gambaran lokasi atau kondisi eksisting sarana pendidikan di kabupaten garut bagian selatan secara visual; dan
- Dikarenakan keterbatasan waktu maka peneliti menggunakan sampel foto dan ploting GPS sarana pendidikan yang diasumsikan setiap kecamatan memiliki 2 (dua) foto dan ploting GPS.
- Untuk mengetahui sarana pendidikan yang tersebar di beberapa kecamatan peneliti menggunakan data statistik dari Dinas Pendidikan berupa alamat sekolah disetiap kecamatan. Setelah diketahui alamat sekolah selanjutnya adalah interpretasi sekolah menggunakan peta citra satelit dengan mengidentifikasi secara visual bentuk bangunan sekolah.

#### 1.6.3 Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam studi ini digunakan metode metode analisis kuantitatif yang dianggap memiliki kesesuaian dengan metode penelitian ini, sehingga diharapkan mencapai tujuan yang ada.

#### A. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Menurut Mitchell J. Rycus , 1988 untuk mempelajari *trend* (kecenderungan) jangka panjang meramalkan efek jangkauan kebijakan pada masyarakat dan memperkirakan masalah — masalah yang potensial, semua ini melengkapi pilihan kebijakan — kebijakan yang rasional bagi para pengambil keputusan.

Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu analisis tingkat pelayanan sarana pendidikan. Hasil analisis tingkat pelayanan mengacu pada standar yang ada yaitu standar mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standar yang dikeluarkan SNI 03 – 1733 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007 tentang SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan didasarkan pada jumlah penduduk pendukung.

Analisis tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum selain itu juga dilakukan dengan cara melihat perbandingan jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah standar kuota setiap sarana pendidikan untuk melihat jumlah sarana yang seharusnya ada di wilayah tersebut.

Adapun perhitungan yang digunakan adalah:

## A. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan adalah kemampuan daya layan sarana pendidikan dalam melayani penduduk berdasarkan radius pencapaian yang telah ditentukan oleh SNI 03-1733 Tahun 2004. Untuk melihat wilayah yang telah terlayani oleh sarana pendidikan dapat dilihat berdasarkan rumus dibawah ini:

## B. Proyeksi Penduduk

Metode yang digunakan untuk menganalisis aspek kependudukan, dibagi menjadi dua metode analisis yaitu *metode regresi linier*, *eksponensial* dimana metode yang dipilih yaitu metode yang r<sup>2</sup> mendekati 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

## 1. Metode Regresi Linier

Model regresi linier memiliki persamaan umum:

Dengan rumus:

$$\mathbf{P} = \mathbf{a} + \mathbf{b} (\mathbf{X})$$

Keterangan:

P = Jumlah Penduduk Tahun terhitung (jiwa)

X = Tambahan tahun terhitung

a, b = Tetapan yang diperoleh dari rumus dibawah ini

$$a = \frac{\sum P \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum PX}{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$
 
$$b = \frac{N \cdot \sum PX - \sum X \cdot \sum P}{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

## 2. Metode Eksponensial

Metode trend oriented dilakukan dengan menggunakan *exponential rate growth*, sehingga dapat diketahui angka pertumbuhan penduduk yang lebih akurat dan berapa jumlah penduduk pada tahun yang direncanakan. Hasil analisis jumlah penduduk yang dilakukan nantinya akan digunakan untuk mempermudah informasi sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan.

$$P_t = P_o \cdot e^{rt}$$

Keterangan:

Pt : Jumlah penduduk pada tahun yang direncanakan

Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar

e : Bilangan pokok dari sistem logaritma natural yang

besarnya sama dengan 2,7182818

r : Angka pertumbuhan penduduk

t : Waktu dalam tahun

#### C. Kebutuhan

Analisis tingkat kebutuhan sarana dilakukan dengan cara melihat standar dari jumlah penduduk.

Analisis tingkat kebutuhan sarana dilakukan dengan menggunakan rumus:

Kebutuhan Kelas/Rombel = 

Standar Kuota Siswa

Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

Standar Kuota Siswa

Jumlah Siswa Berdasarkan Kelas

Kebutuhan Sekolah = 

Standar Kuota Kelas

## D. Tingkat Pelayanan

Analisis tingkat pelayanan digunakan untuk mengukur pelayanan yang diberikan dari sarana yang ada dengan membandingkan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah penduduk yang ada. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat pelayanan ini adalah:

Tingkat Pelayanan = Jumlah Sarana Yang Ada

Jumlah Yang Seharusnya

Jumlah yang seharusnya = Jumlah Siswa Berdasarkan Kelas

Standar Kuota Kelas

# E. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Adapun perhitungan APM dengan rumus sebagai berikut :

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Adapun perhitungan APK dengan rumus sebagai berikut:

APK SD	=	Jumlah Siswa SD Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	X 100
APK SMP	=	Jumlah Siswa SMP Penduduk Usia 13 – 15 Tahun	X 100
APK SMA	=	Jumlah Siswa SMA Penduduk Usia 16 – 18 Tahun	X 100

#### 1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan Studi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang studi, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi, yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kajian pustaka, metode pendekatan yang digunakan, serta sistematika penyajian akan dijelaskan pada bab ini.

## BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab kedua berisi tinjauan teoritis mengenai berbabagai aspek yang melandasi analisis dan kajian pada bab selanjutnya. Tinjauan ini mencakup pengertian dan fungsi fasilitas sarana pendidikan serta litelatur mengenai sarana pendidikan.

### BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini membahas kondisi wilayah karakteristik Kabupaten Garut bagian selatan, yang terdiri dari kondisi fisik, kependudukan dan sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan.

# BAB IV ANALISIS SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GARUT BAGIAN SELATAN

Bab ini merupakan inti dari studi yang membahas mengenai analisis dan rencana sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan.

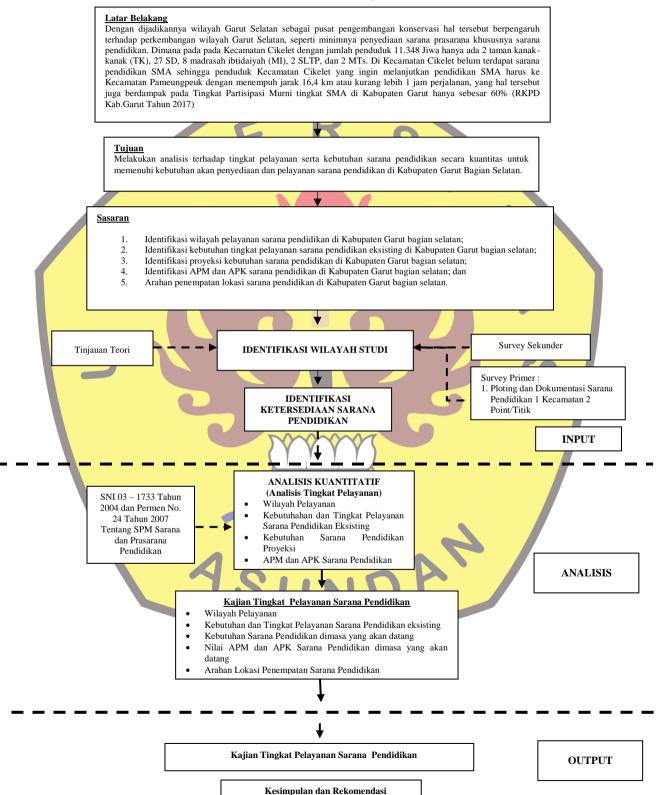
## BAB V K<mark>ESIMPULAN DAN REKOMEN</mark>DASI

Bab terakhir ini berisikan mengenai ringkasan dari studi yang telah di lakukan serta rekomendasi terhadap wilayah kajian serta studi lanjutan.

## 1.8 Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian dibutuhkannya kerangka berpikir adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### Gambar 1.2 Kerangka Pikir



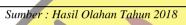
## 1.9 Matrik Analisis

Dalam suatu penelitian dibutuhkannya matrik analisis guna menentukan analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti, adapun matrik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

**Tabel 1.3 Matrik Analisis** 

No	Sasaran	Rumusan Masalah	Analisis	Data Yang Dibutuhkan
1	Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan	Tingkat pelayanan sarana pendidikan saat ini belum bisa melayani penduduk berdasarkan usia pendidikan terutama di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan jenjang pendidikan sekolah menengah atas atas Kabupaten Garut bagian selatan	Jumlah sarana yang ada pada tahun eksisting dibagi dengan jumlah sekolah yang seharusnya.	- Sarana Pendidikan yang ada - Sarana yang seharusnya
2	Wilayah Pelayanan	Luas wilayah yang luas antar kecamatan menjadi permasalahan penduduk berasarkan usia dalam menjalani aktifitasnya untuk bersekolah	Luas wilayah setiap kecamatan dibagi total radius setiap jenjang pendidikan	- Luas Radius setiap sarana pendidikan - Luas setiap kecamatan
3	Kebutuhan Sarana	Jumlah kebutuhan sarana pendidikan saat ini belum dapat menampung penduduk berdasarkan usia pendidikan di Kabupaten Garut bagian selatan	Dengan cara melihat jumlah penduduk berdasarkan usia setiap 5 tahun kedepan dibagi dengan menggunakan standar kuota siswa/jenjang pendidikan.	<ul> <li>Jumlah penduduk berdasarkan usia</li> <li>Standar kuota siswa/kelas</li> <li>Standar kuota kelas/sekolah</li> </ul>
4	APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar)	Nilai APM dan APK sarana pendidikan pada saat ini masih dibawah 100% pada jenjang sekolah menegah kecuali sarana pendidikan jenjang sekolah dasar di Kabupaten Garut bagian selatan	Dengan cara membandingkan jumlah siswa pada setiap jenjang dengan jumlah penduduk di setiap kecamatannya	<ul> <li>Jumlah siswa/murid setiap jenjang pendidikan</li> <li>Jumlah penduduk berdasarkan umur pendidikan</li> </ul>

No	Sasaran	Rumusan Masalah	Analisis	Data Yang Dibutuhkan
5	Arahan Penempatan Lokasi Sarana Pendidikan	Banyaknya lokasi potensial yang bisa dijadikan untuk tempat menyediakan unit sekolah di setiap jenjang pendidikan jika ada penambahan sekolah.	Untuk menempatkan sarana pendidikan dari hasil analisis kebutuhan sarana dapat dilihat dari beberapa faktor. Yaitu faktor aksesibilitas, faktor lingkungan, faktor kepadatan serta kesesuaian lahan permukiman.	- Peta RTRW Kabupaten Garut - Hasil Analisis Overlay satuan kemampuan lahan





#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-buku Bacaan

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunana Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Kustiawan, Iwan dan Nia K Pontoh. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB.

Sadyohutomo. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sabari Yunus, Hadi 2002. Struktur Tata Ruang Kota 2002.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Puspasari, Amelia 2014. Teory Christaller and Losch.

## Peraturan dan Kebijakan

Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.543/KPTS/M/2001
Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahaan di Perkotaan

Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031

#### Studi Literatur

Andita, Aniarani. 2008. "Evaluasi Pelayanan Pusat Primer Alun-Alun Kota Bandung". Institut Teknologi Bandung

Lisanti, Meyliana. 2015. "Kajian Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Perkotaan Subang". Universitas Pasundan

- Munandar, Andi. 2011. "Kajian Penentuan Pusat Pelayanan di Kabupaten Gunung Mas". Universitas Pasundan
- Tytoer R.A. Bandaso, 2014. "Kinerja Pelayanan Sarana Umum di Kawasan Permukiman Terpadu Panakukang Mas Kota Makassar Berdasarkan Pendapat Masyarakat Pengguna". Universitas Dipenogoro
- Kaniasari, Puspita. 2016. "Studi Kinerja Pelayanan Pusat Primer Kedua Gedebage di Kota Bandung". Universitas Pasundan

#### Jurnal

- Sumarno, 2008. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cepego Kabupaten Boyolali. Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Henlita, Sisca., Handayani, Ketut Dewi Martha Eli. 2013. Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
- Gewab, Hapon Ch., Malik, Andi A., Karongkong, Hendiek H., 2014. *Analisis Kebutuhan dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Handayani, Ajeng Dwi. 2014. *Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pundakpayung*. Semarang: Universitas Dipenogoro
- Erlina, Moni., Rianto, Slamet., Setriani, Loli., 2015. Ketersediaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendidikan Di SMP Negeri 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya. Padang: STKIP PGRI